

**Tabel 3.4**  
**Analisis SWOT**

STRENGTH (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
<p>a. Adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Hal ini terlihat dari visi, misi, strategi, kebijakan dan agenda utama pemerintah Kabupaten Banggai periode tahun 2016-2021 yang menekankan bahwa salah satu fokus dan prioritas pembangunan daerah adalah penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui pengembangan teknologi informasi;</p> <p>b. Adanya potensi pengembangan infrastruktur TIK yang mendukung pelayanan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>c. Adanya potensi pengembangan interkoneksi perangkat daerah dan pengembangan aplikasi informatika yang mendukung implementasi dan peningkatan <i>e-government</i> di Kabupaten Banggai. E-Government (e-Gov) ini sendiri merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, atau penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara sederhana, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.</p> <p>d. Adanya potensi pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) perangkat daerah secara online melalui website;</p> <p>e. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) dari berbagai disiplin ilmu komunikasi dan teknik informatika;</p> <p>f. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);</p> <p>g. Adanya potensi pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat, Warung Informasi Masyarakat dan Gerakan Nasional Anti Hoax guna mendukung kebijakan pengendalian isu publik dan pencegahan <i>cyber crime</i>.</p> <p>h. Adanya regulasi pemerintah Kabupaten Banggai yang mengatur tentang lembaga penyiaran lokal dan KMIP daerah</p>	<p>a. Kondisi geografis Kabupaten Banggai menyebabkan keterbatasan layanan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah <i>blankspot</i>;</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) oleh pihak provider/swasta berorientasi komersil (<i>profit oriented</i>);</p> <p>c. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government perangkat daerah;</p> <p>d. Belum maksimalnya interkoneksi seluruh perangkat daerah melalui integrasi jaringan internet dan intranet;</p> <p>e. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai;</p> <p>f. Lemahnya koordinasi antar bidang;</p> <p>g. Lemahnya kapasitas sumber daya aparatur;</p> <p>h. Lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang luas dan beragam dibandingkan dengan sumber daya manusia yang terbatas.</p> <p>i. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok informasi masyarakat.</p> <p>j. Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan database statistik sektoral;</p> <p>k. Belum tersedianya gedung kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas dan pengembangan data center dan penyediaan media center;</p> <p>l. Belum optimalnya pelayanan dan diseminasi informasi publik.</p> <p>m. Masih lemahnya tata kelola dan operasional pengamanan data/informasi.</p> <p>n. Masih rendahnya kesadaran ASN pemda terhadap keamanan data/informasi.</p> <p>o. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta.</p> <p>p. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor di Provinsi</p>

OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot (wifi publik) di sejumlah titik lokasi untuk layanan akses internet bagi masyarakat;</li> <li>b. Penyediaan akses internet publik yang semakin mudah;</li> <li>c. Kebijakan Kemenkominfo yang mendukung optimalisasi dan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui pendidikan dan pelatihan di BPPTIK;</li> <li>d. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi.</li> <li>e. Penetapan kebijakan tata kelola pengamanan persandian.</li> <li>f. Penataan dan penguatan kelembagaan persandian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya jaringan kelompok-kelompok <i>cyber crime</i> nasional maupun transnasional, yang sifatnya provokatif, berpotensi mengganggu sistem informasi milik pemerintah daerah;</li> <li>b. Maraknya penyebaran <i>hoax</i> dan konten-konten negatif yang mengandung unsur SARA berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI;</li> <li>c. Berkembangnya jumlah penduduk dengan berbagai konflik kepentingan</li> </ul>